

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Dr. Yahman, S.H., M.H. 2014 *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan*, Jakarta: Prenadamedia.
- Soekanto Soerjono Dan Sri Mamudji. 2014. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Tangerang, PT Nusantara Persada Utama.
- Adami chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Tofik Yanuar Chandra, 2022, "*Hukum Pidana*", Jakarta, PT. Sangir Multi Usaha
- Hartanti Evi, 2007, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafikasi.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta.
- Ekon P. Melkianus Yanto, *Bahan Ajar Hukum Acara Pidana*.
- Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H. 2019 *Hukum Acara Pidana*, Depok: PT Raja Grafindo Persada.

Jurnal:

- Wiradireja, Hilda Sophia, "*Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Didasarkan Pada Keterangan Palsu Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan KUHP*", Jurnal Wawasan Hukum, 2015.

Helmi Abdul Azis, Dahlan Ali, *Tindak Pidana Penipuan Dengan Menggunakan*

Sarana Undang-Undang Perjanjian Yang Dibuat Di Hadapan Notaris.

Jurnal Ilmiah, 2018

H. Dudung Mulyadi, “*unsur-unsur penipuan dalam pasal 378 KUHP dikaitkan dengan*

jual beli tanah”, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, 2017.

Randi Aritama, *Penipuan Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata*, Jurnal Riset

Ilmiah SENTRI, 2022.

Maylia Ayu Riftianti, *Akibat Hukum Akta Kuasa Jual Yang Dibuat Oleh Notaris Dalam*

Tindak Pidana Penipuan, Jurnal Hukum Kenotariatan, 2020.

Undang-Undang:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014.

Putusan:

- 1) Nomor 196/Pid.B/2019/PN Dps
- 2) Nomor 27/Pid/2019/PT DPS

Nomor 20 PK/Pid/2020